

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

Bab landasan teori ini diuraikan mengenai: (1) novel sebagai karya sastra, (2) unsur pembangun novel, (3) sosiologi sastra, (4) politik lokal dalam sosiologi sastra, (5) bentuk partisipasi politik lokal dan, (6) kekerasan politik lokal. Berikut ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan landasan teori yang digunakan.

#### **2.1 Novel sebagai Karya Sastra**

Karya sastra hadir sebagai cerminan atau gambaran kehidupan sosial masyarakat dan fenomena atau kejadian yang terjadi di alam semesta. Karya sastra merupakan hasil dari proses kreatif seorang penulis dengan mengadopsi keadaan lingkungan masyarakat. Seperti yang diungkapkan Sugiarti (2009:165) bahwa sastra tidak dapat terlepas dari tata nilai kehidupan sosial. Sastra ada dua macam yaitu sastra tulis dan sastra lisan, salah satu contoh sastra tulis adalah novel.

Novel merupakan karya fiksi yang dapat diartikan sebuah karya rekaan seorang pengarang, dalam fiksi jauh lebih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi daripada di dunia nyata. Hal ini sejalan dengan pendapat Aristoteles (dalam Nurgiyantoro 2013:9) yang mengungkapkan bahwa dalam proses penciptaannya pengarang atau sastrawan tidak hanya memasukan realita kehidupan atau kenyataan melainkan menambahkan imajinasi dan kreatifitas pengarang itu sendiri. Dengan demikian dunia yang yang tergambar dalam sebuah novel lebih menarik untuk dinikmati.

Novel adalah wujud karya sastra yang dalam alur ceritanya mengandung nilai-nilai kehidupan yang apabila dicerna lebih dalam dapat memberikan hikmah kepada pembaca. Novel menyampaikan permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan cerita fiksi lainnya yang cenderung memiliki alur yang lebih pendek. Kata “novel” berasal dari bahasa Itali yaitu *novella* (dalam bahasa Jerman: *novelle*). *Novella* yang berarti sebuah barang baru yang kecil dan kemudian diartikan sebagai cerita pendek dalam bentuk prosa. (Abrams dalam Nurgiyanto, 2013:11)

Salah satu tema yang sering digambarkan pengarang dalam membuat sebuah novel adalah bertema sosial. Hal tersebut dibuat bukan hanya semata-mata sebagai hiburan belaka akan tetapi sebagai media belajar atau renungan untuk pembaca. Novel juga dapat menjadi media kritik terhadap keadaan sosial masyarakat yang sekarang terjadi, sehingga novel juga dapat disebut sebagai dokumen sosial suatu negara.

Pengarang menyajikan suatu novel yang menarik sekaligus mendidik tentunya tidak lepas dari permasalahan yang kompleks detail dan rinci. Unsur-unsur dalam novel diperlukan untuk mendukung dan membangun cerita yang lebih hidup, adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra adalah unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri, sedangkan ekstrinsik berasal dari luar karya sastra.

### 2.1.1 Unsur Pembangun Novel

Novel merupakan sebuah totalitas karya yang artistik, tanpa adanya unsur-unsur sebuah novel tidak akan tercipta. Unsur pembangun sangatlah penting,

terdapat dua unsur yaitu unsur intrinsik (dari dalam karya) dan ekstrinsik (dari luar karya), unsur intrinsik antara lain penokohan, tema, alur atau plot, dan latar atau seting.

a) Tokoh dan Penokohan

Sebuah novel tidak mungkin dibuat tanpa adanya tokoh, tokoh sendiri merupakan pelaku atau pemain yang mengalami berbagai peristiwa dan alur dalam sebuah cerita fiksi. Tokoh dan penokohan adalah hal yang tidak persis sama meskipun sepintas terlihat sama. Istilah tokoh tentunya menunjukan pada orang sedangkan penokohan adalah karakter yang diperankan tokoh.

Abrams (dalam Nurgiyanto, 2013:247) mengemukakan bahwa tokoh adalah orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama, sedang penokohan (*characterization*) adalah penghadiran tokoh dalam cerita fiksi atau drama dengan cara langsung atau tidak langsung dan mengundang pembaca untuk menafsirkan kualitas dirinya lewat kata dan tindakannya.

Tokoh dan penokohan memegang pengaruh yang sangat penting dalam sebuah novel. Tokoh hadir bukan hanya untuk melengkapi cerita dalam novel, akan tetapi juga menyampaikan ide, plot, tema. Setiap tokoh juga memiliki karakter masing-masing yang dipengaruhi oleh berbagai latar sosial yang semakin menambah kompleks suatu karya.

b) Tema

Selain tokoh dan penokohan tema merupakan hal penting dan pasti terdapat dalam setiap karya sastra tema dapat juga disebut garis besar atau ide sebuah cerita. Tema selalu berkaitan dengan makna atau hikmah yang terdapat dalam sebuah cerita. Hal ini sejalan dengan pendapat Stanton dan Kenny (dalam

Nurgiyanto, 2013: 114) yang mengatakan bahwa tema adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita.

Terdapat berbagai macam tema yang dihadirkan dalam sebuah karya sastra, yang menyangkut persoalan sosial, lingkungan, agama, politik, cinta, sosial budaya, dan masih banyak lagi. Akan tetapi tidak jarang juga sebuah karya sastra mempunyai dua tema atau lebih. Terdapat tema *mayor* (gagasan atau makna umum cerita) dan tema *minor* (gagasan atau makna tambahan dalam cerita. Oleh karena itu terkadang sulit menentukan tema pokok dalam sebuah cerita, akan tetapi hal tersebut justru membuat sebuah karya sastra khususnya novel mejadi semakin kompleks dan menarik.

#### c) Alur atau Plot

Alur atau plot merupakan unsur pembangun yang penting dalam sebuah karya sastra. Plot adalah jalan cerita atau urutan sebuah kejadian yang dialami tokoh dalam suatu cerita. Peristiwa satu ke peristiwa berikutnya diolah secara kreatif oleh pengarang sehingga membuat cerita dalam novel semakin hidup. Peristiwa yang digambarkan merupakan kejadian sebab akibat yang dialami tokoh. Sejalan dengan Stanton (dalam Nurgiyantoro, 2013: 164) yang menyatakan bahwa plot adalah urutan kejadian, dan dihubungkan oleh kejadian sebab akibat, peristiwa yang satu menyebabkan atau disebabkan oleh peristiwa yang lain.

Alur atau plot memiliki beberapa tahap, tahap pertama adalah pengenalan, kedua penampilan, ketiga tahap konflik, keempat tahap klimaks, dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian masalah. Menciptakan alur yang sulit ditebak dan penuh kejutan membutuhkan kreatifitas dan imajinasi yang benar-benar totalitas. Menurut Staton, dll (dalam Sukanda, 2013:85) pada intinya plot merupakan

*cause-effect*, tetapi unsur yang terpenting adalah pada konflik dan klimaks yang ditumbuhkan oleh perlawanan tokoh antagonis dan protagonis.

Teknik pengaluran sendiri menurut Santono (dalam Rokhmansyah, 2014:37) ada dua yaitu alur maju (progresif) dan alur mundur (regresif). Alur maju yaitu dari tahap awal, puncak hingga menuju tahap akhir atau penyelesaian masalah, sedangkan alur mundur cerita diawali dengan penyelesaian masalah atau akhir cerita kemudian menuju tengah hingga mencapai tahap awal peristiwa.

#### d) Latar atau *Setting*

Latar merupakan unsur yang mampu menggambarkan kesan nyata pada sebuah cerita. Seperti yang diungkapkan oleh Aminudin (2015:64) yang menyatakan bahwa latar atau *setting* tidak hanya berfungsi sebagai bentuk fisik atau nyata supaya cerita terlihat logis akan tetapi latar juga berfungsi sebagai penggerak emosi pembaca melalui suasana yang diciptakan.

Dalam menghadapi setiap peristiwa tokoh tentunya memerlukan tumpuan tempat, waktu dan sosial budaya yang semakin menumbuhkan imajinasi pembaca. Abrams (dalam Nurgiantoro 2013:202 ) mengungkapkan bahwa latar atau *setting* disebut juga landasan tumpu, yang menunjukkan pada pengertian tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat cerita atau peristiwa terjadi. Latar tempat menunjukkan lokasi dimana peristiwa dalam cerita terjadi, latar waktu berhubungan dengan kapan peristiwa dalam cerita terjadi, dan latar sosial budaya menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku hidup masyarakat sosial.

## 2.2 Sosiologi Sastra

Sosiologi merupakan ilmu yang membahas mengenai kehidupan sosial dalam masyarakat. Sosiologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *socius* yang berarti bersama-sama, dan *logos* yang berarti perumpamaan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya tidak lepas dari interaksi yang terjalin secara nyata dalam sebuah kehidupan masyarakat. Sosiologi sebagai sebuah ilmu pemahaman yang objektif-empiris, sosiologi sebenarnya mempelajari manusia sebagaimana yang ditemukan dan dialami secara nyata dan langsung dalam kehidupan sehari-hari (Faruk, 2012:17)

Kehidupan sosial yang dipelajari dengan sosiologi sastra sangat luas dikarenakan objek-objek pengamatan langsung cenderung muncul dengan beragam variasi senantiasa berubah dan tidak memiliki aturan. Swingewood (dalam Wiyatmi, 2013:6) mengungkapkan bahwa sosiologi merupakan studi ilmiah objektif mengenai masyarakat dan lembaga-lembaga dan proses sosial. Lembaga-lembaga tersebut berperan untuk mengatur masyarakat agar terjalin komunikasi dan kehidupan yang harmonis.

Hubungan antara sosiologi dan sastra juga tidak dapat terpisahkan mengingat pengarang berasal dari kehidupan sosial dan cerita yang disajikan merupakan gambaran kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Sejalan dengan pendapat Damono (dalam Suhariyadi, 2014:49) yang menyatakan bahwa sastra menampilkan gambaran kehidupan dan kehidupan adalah kenyataan sosial yang menyangkut dengan masyarakat dan antarperistiwa yang terjadi dalam batin seseorang.

Sosiologi sastra sendiri memiliki 3 aspek wilayah kajian yang meliputi sosiologi pengarang, sosiologi pembaca, dan sosiologi karya sastra.

a. Sosiologi pengarang

Sosiologi pengarang yakni mempermasalahkan status dan kehidupan sosial pseorang pengarang. Secara tidak langsung pengarang akan memasukan pengalaman yang dialami dalam cerita yang dibuat. Menurut wellek dan Werren (dalam Wiyatmi, 2013:30) sosiologi pengarang dibagi menjadi 7 aspek yaitu, status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang, latar belakang sosial dan budaya pengarang, masyarakat pembaca yang dituju, pekerjaan pengarang, dan profesionalisme dalam mengarang.

b. Sosiologi pembaca

Pembaca merupakan bagian yang penting dalam sastra, seorang pembaca adalah penikmat sekaligus penilai sebuah karya sastra. Analisis sosiologi pembaca tidak lepas dari sikap-sikap pembaca dan dampak karya sastra itu sendiri bagi pembaca, selain itu latar belakang pembaca juga menentukan. Sebuah karya sastra yang baik adalah karya yang mampu membuat pembaca benar-benar merasakan seperti apa yang dikisahkan dalam sebuah novel, baik itu kesedihan, senang, terancam dan peristiwa-peristiwa lain.

c. Sosiologi karya sastra

Sosiologi karya sastra adalah karya sastra yang mengkaji tentang berbagai masalah sosial yang terdapat dalam kehidupan nyata. Berangkat dari teori mimesis Plato yang mengungkapkan bahwa karya sastra adalah tiruan dunia nyata. Sementara itu fokus sosiologi karya sastra adalah pada isi karya tersebut, isi dalam karya sastra mampu menjadi dokumen atau sebagai potret sosial, sastra

mampu menyampaikan ciri-ciri permasalahan sosial pada masa karya tersebut diciptakan.

Sosiologi sastra mempelajari kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan khususnya pada segi politik. Berdasarkan pembahasan tersebut maka penulis dalam menganalisis novel *Tanjung Kemarau* karya Royyan Julian ini menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra. Pendekatan ini mengacu pada isi karya sastra tersebut terkait permasalahan dan tujuan yang ingin disampaikan oleh pengarang.

### 2.3 Pengertian Politik Lokal

Ilmu politik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani "*polis*" dan bahasa Inggris "*politics*" kedua kata tersebut menunjukkan arti yang sama yaitu kebijaksanaan untuk mencapai hal-hal yang baik. Kajian tentang politik tentunya sangat luas. Miriam Boerdiardjo (dalam Sahid, 2011:5) mengungkapkan, bahwa konsep-konsep pokok politik adalah negara, kebijakan, dan pembagian atau lokasi. Selain itu juga banyak kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan untuk menuju tujuan yang diinginkan.

David Easton (dalam Damsar, 2010:11) menyatakan bahwa politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa politik cenderung pada kekuasaan, aturan dan kewenangan pihak-pihak berwajib. Leon (dalam Sahid 2011:32) mengemukakan bahwa kekuasaan adalah gejala yang wajar terjadi dalam masyarakat sebagai bentuk kehidupan bersama. Sekecil apaun level masyarakatnya akan selalu ada seorang yang memerintah, diperintah, dan mengambil keputusan.



Maurice (dalam Damsar, 2010:11) berpendapat bahwa politik bersifat ambivalen yang berarti terdapat dua hal yang saling bertentangan. Di satu sisi, politik merupakan cara atau konflik untuk meraih sebuah kekuasaan terhadap masyarakat. Sedangkan di pihak lain individu atau kelompok berusaha untuk menentang dan merebutnya, dan di sisi lain politik adalah sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Politik tidak hanya terdapat dalam pusat negara atau nasional akan tetapi terdapat pula politik lokal yang mencakup kota, kabupaten, dan desa termasuk dalam golongan politik lokal yang berarti politik lokal di bawah pemerintahan nasional. Politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada level lokal. Dalam hal ini, semua hal yang berkaitan dengan politik seperti halnya pemerintahan lokal, pembentukan kebijakan daerah, maupun pemilihan kepala daerah.

Politik lokal bukan hanya berurusan pada soal-soal administrasi publik atau menekankan pada hubungan kerja pemerintah semata. Gerry (dalam Zaini, 2018:53) mengungkapkan bahwa politik lokal memiliki cakupan yang cukup luas, misalnya aspek ekonomi, sosial, dan politik karakteristiknya relatif terbuka, beragam, dan kompetitif. Kekuasaan pemerintahan lokal dilakukan lebih untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan lokal dalam pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dengan kemampuan pemerintah lokal dalam mengakomodasi tuntutan tersebut.

Pada realitasnya, politik lokal banyak diwarnai tawar-menawar atau *bargaining* dari koalisi antar elit lokal dan aktor-aktor tertentu dalam masyarakat. Untuk pencarian suara atau dukungan para calon lebih cenderung akan

mendekatkan diri dengan warga terutama kepada tetua adat maupun orang yang dianggap penting dalam suatu daerah. Banyak kepentingan terselubung dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syarif Hidayat (dalam Zaini, 2018:54) secara umum kepentingan daerah dibedakan dalam dua kategori, pertama kepentingan publik dan individu. Kepentingan pertama terkait dengan peningkatan swasta dan pendukung pemerintah pusat, sedangkan yang kedua lebih kepada kepentingan individu atau elit lokal. Terdapat tiga bentuk kepentingan individu elit lokal yaitu, kepentingan ekonomi, pengembangan karir dan kepentingan untuk sponsor politik. Semua kepentingan tersebut berlangsung dengan tujuan yang eksplisit disertai tujuan implisit.

Pemerintah nasional tidak dapat ikut campur secara penuh dalam politik lokal hal tersebut dikarenakan setiap daerah telah memiliki tatanan atau peraturan masing-masing. Pemerintah daerah lebih paham dengan wilayahnya sendiri, akan tetapi tidak berarti tatanan wilayah daerah memiliki tatanan yang bebas dan lepas dari tatanan nasional. Pelaksanaan politik lokal juga harus tetap sejalan dengan politik nasional dan berkiblat pada tatanan politik nasional dimanana harus menggunakan pemilu dalam setiap pemilihan. Haryanto (2009:132), menyatakan bahwa pada tatanan nasional pemilihan kepala pemerintah adalah pemilihan presiden sedangkan dalam level lokal mencakup pemilihan kepala desa, walikota, bupati maupun camat. Keduanya sama-sama membutuhkan masyarakat sebagai partisipan akan tetapi berbeda, jika pemilihan nasional membutuhkan seluruh warga Indonesia dan pada pemilihan lokal cukup warga asli atau warga yang telah menetap di daerah tersebut.

Politik Lokal sering diangkat menjadi sebuah permasalahan dalam karya sastra salah, satu contoh karya yang mengangkat politik lokal sebagai objek permasalahannya adalah *Jatisaba* karya Ramayda Akmal, *Tanah Surga Merah* karya Arafat Nur, *Tanjung Kemarau* karya Royyan Julain, dan masih banyak lagi. Hal tersebut tentunya wajar mengingat permasalahan politik adalah kenyataan sosial yang memang sangat penting untuk dikritisi dengan tujuan menyadarkan masyarakat dan memberikan edukasi.

Pengarang menjadikan politik sebagai tema utama bukanlah tanpa sebab melainkan sebagai bentuk edukasi dan kritikan terhadap keadaan Indonesia, dimana politik masih sering menjadi permasalahan sosial yang sulit untuk diselesaikan. Sastra dan politik akan selalu bertemu apalagi pada masa orde baru di mana banyak rezim yang sangat keras terhadap masyarakat. Begitu besarnya pengaruh karya sastra dalam politik membuat para sastrawan harus bolak-balik dalam tahanan karya karyanya yang dianggap mengancam pemerintah pada masa itu. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa antara sastra dan politik sangat kompleks.

Sosiologi sastra melihat karya sastra sebagai dokumen sosial budaya ditandai dengan beberapa hal. Pertama, isi cerita di mana dalam karya yang diciptakan terlepas dari unsur lain. Kedua, pendekatan yang mengambil citra tentang sesuatu, misalnya tentang manusia, budaya, politik, dan lain-lain. Ketiga, pendekatan sosiologi karya sastra dapat mengambil tema atau motif yang terdapat dalam karya sastra terhadap hubungannya dengan kenyataan. Pendekatan cenderung melihat hubungan langsung antara unsur karya sastra dan unsur yang terdapat dalam masyarakat.

## 2.4 Bentuk-bentuk Partisipasi Politik Lokal

Menurut Gabriel Almond (dalam Sahid, 2011: 178) partisipasi politik tidak hanya mengambil peranan konteks dalam kegiatan politik, akan tetapi partisipasi politik selalu diawali oleh adanya kepentingan individu untuk berupaya mengontrol sumber daya politik. Bentuk-bentuk partisipasi politik lokal merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat demi mendukung berjalannya sistem politik tersebut. Bentuk-bentuk umum dari politik lokal ini adalah pemberian suara pada pemilihan umum. Huntiton dan Nelson (dalam Sahid, 2011:182) mendeskripsikan bentuk-bentuk partisipasi politik yang ada pada sistem politik terbagi menjadi beberapa bentuk sebagai berikut:

### 2.4.1 Kegiatan Pemilihan

Salah satu bentuk kegiatan politik lokal adalah pemberian suara atau *voting*. *Voting* adalah kegiatan pemilihan suara untuk mendapatkan suara terbanyak, dengan pemberian suara masyarakat bebas memilih calon yang dirasa tepat dan dapat membawa perubahan dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pemilihan mencakup pemberian suara memberikan sumbangan untuk kampanye, mencari dukungan untuk calon dan melakukan semua tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi hasil pemilihan.

Pemberian suara terdapat hampir di semua sistem politik, baik demokratik maupun otoriter. Pemilihan umum pada negara-negara berpartai tunggal lebih kepada memberi kesempatan kepada para kaum elite yang berkuasa untuk berpropaganda dan memobilisasikan rakyat, partisipasi rakyat tidak memberi pengaruh dalam kebijaksanaan pemerintah (Mas'ood 2006:46). Jadi pemberian

suara merupakan tindakan mencari dukungan rakyat terhadap sistem politik dimana para kaum elite yang berkuasa. Masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memberi suara dapat dikatakan sebagai protes yang dilakukan diam-diam.

*Voting* sendiri merupakan cerminan demokrasi Pericles (dalam Sahid, 2011:304) mengemukakan bahwa demokrasi terdiri dari beberapa kriteria, yaitu (1) pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi oleh rakyat secara penuh. (2) keamanan di depan hukum; (3) pluralisme adalah kesediaan untuk menerima keberagaman dari masyarakat tidak memihak secara ras, agama maupun budaya ; dan (4) penghargaan terhadap suatu pemisahan dan wilayah pribadi. Apabila pendapat Pericles di atas dilaksanakan dengan sebaik mungkin maka kegiatan pemilihan umum akan sangat tertata dan aman.

Terdapat beberapa sistem pemilihan yang sering dipakai dalam pemilihan umum, yaitu:

a. Sistem pemilihan umum proposional

Sistem ini diikuti oleh beberapa partai yang akan merebutkan jabatan sesuai dengan jumlah perolehan suara. Terdapat 2 sistem proposional, yaitu sistem proposional terbuka dalam sistem ini tidak hanya memilih gambar partai akan tetapi memilih gambar calon yang dikehendaki. Selanjutnya sistem proposional tertutup dalam sistem ini pemilih hanya dapat memilih gambar partai yang mecalonkan dan partai yang menentukan siapa yang akan dipilih.

b. Sistem distrik

Sistem distrik yaitu sistem pemilihan yang dibagi atas distrik wilayah dimana jumlah distrik akan disamakan dengan jumlah anggota dewan yang telah ditentukan (Muhammad Farhan, 2014:16)

Selanjutnya terdapat 2 model pemilihan secara nasional, yaitu pemilihan secara langsung dan tidak langsung. Pemilihan secara langsung ialah pemilihan yang dilakukan langsung oleh masyarakat dan masyarakat yang akan menentukan calon yang dipilih. Sementara pemilihan tidak langsung ialah pemilihan yang ditentukan oleh partai politik, pemilihan ini melalui perwakilan sehingga rakyat tidak dapat menentukan siapa calon yang dipilih. Seperti halnya pemilihan nasional pemilihan kepala desa juga menggunakan azas langsung, umum, rahasia, jujur, bebas, dan adil. Dengan demikian demokrasi dapat benar-benar dilaksanakan dan terbukti keberadaannya.

#### **2.4.2 Kegiatan Organisasi**

Organisasi pada umumnya dijadikan tempat atau wadah orang-orang untuk berkumpul dan berkerjasama yang dilaksanakan secara terorganisir, terencana, dipimpin dan sistematis. Organisasi adalah kelompok yang bergerak dan berkepentingan dalam bidang yang sama tidak terkecuali dalam organisasi politik. Organisasi dalam bidang politik secara aktif menentukan nasib sebuah bangsa. Organisasi politik juga mengambil peran penting dalam tatanan pada suatu wilayah masyarakat dalam pemerintahan yang sah.

Kegiatan organisasi adalah kegiatan yang menyangkut berbagai hal sebagai seorang anggota atau pejabat dalam sebuah organisasi yang tujuan kegiatan organisasi tersebut adalah mempengaruhi hasil keputusan. Kegiatan organisasi yang lainnya ialah menentukan strategi atau taktik supaya mendapatkan apa yang diinginkan baik itu menyangkut kekuasaan, kepemimpinan, karier dan lain lain. Sebagaimana yang diungkapkan Hans (dalam Damsar, 2013:11) bahwa

politik sebagai pertarungan untuk memperoleh kekuasaan. Dengan demikian kegoatan organisasi menjadi sangat penting dalam berpolitik.

Dalam sebuah organisasi, anggota yang terlibat di dalamnya akan membawa minat, pendapat, kepentingan, pandangan, dan tujuan yang berbeda-beda. Proses tawar-menawar dan saling mempengaruhi sangat wajar dalam kegiatan organisasi. Oleh karena itu pentingnya menyatukan pendapat demi medapat keputusan yang seutuhnya adalah hal yang harus dilakukan. Pada dasarnya politik adalah interaksi antarmanusia dengan diperoleh dan digunakannya kekuasaan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa politik tidak hanya digunakan dalam pemerintahan saja akan tetapi semua organisasi keagamaan, kelompok suku, marga, badan usaha dan klub-klub pribadi.

### **2.4.3 *Lobbying***

*Lobbying* atau jika diartikan dalam bahasa Indonesia lobi, merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mempengaruhi dengan tujuan tertentu. Lobi dapat juga diartikan sebagai sebuah pendekatan dengan maksud memperoleh keuntungan. Lobi merupakan upaya yang dilakukan baik individu ataupun secara kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat atau pemerintah dengan maksud dapat merubah keputusan yang akan diambil. Menurut Nofriansyah (2015:3) lobi sering dikaitkan dengan kegiatan politik dan bisnis. Lobi adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan individu ataupun kelompok dengan tujuan memengaruhi pimpinan organisasi lain maupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan, sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri ataupun organisasi dan perusahaan pelobi.

Lobi merupakan bagian dari aktivitas komunikasi. Lingkup komunikasi yang luas menyebabkan aktivitas lobi juga sama luasnya. Lobi ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan atau target seseorang atau organisasi, dan apa yang dimaksudkan tersebut berada di bawah kontrol atau pengaruh pihak lain (individu maupun lembaga). Dengan demikian, lobi bertujuan untuk memengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain sehingga orang atau pihak lain tersebut sependapat dengan pelobi.

Lobi memiliki manfaat untuk memberikan pengertian yang menyeluruh mengenai sebuah tujuan baik individu maupun perusahaan, kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menyamakan persepsi mengenai banyak hal yang berkaitan dengan keinginan dan tujuan masing-masing. Dari lobi kemudian juga dapat ditemukan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan kedua belah pihak yang diteruskan lewat kegiatan negosiasi yang akhirnya dapat menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, lobi merupakan suatu kegiatan dari orang-orang yang berusaha untuk memengaruhi orang lain untuk suatu tujuan tertentu, baik itu sebuah lembaga pemerintahan maupun suatu organisasi.

## **2.5 Kekerasan Politik Lokal**

Berbicara kekerasan berarti kita harus membicarakan apa yang dimaksud dengan kekerasan. Douglas dan Waksler (dalam Santoso, 2002:11) mengemukakan bahwa kekerasan merupakan sebuah tindakan yang terbuka atau tertutup dan yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, sehingga kekerasan dapat diidentifikasi menjadi : (1) kekerasan terbuka misalnya perkelahian; (2) kekerasan tertutup, misalnya



mengancam: (3) kekerasan agresif, misal untuk mendapatkan sesuatu; (4) kekerasan defensif, misal untuk perlindungan.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang sering terjadi di kalangan masyarakat. Sejak zaman dahulu kekerasan menjadi gejala sosial yang sulit untuk dihilangkan. Kekerasan sendiri merupakan tindak kriminalitas yang merugikan bagi korban baik secara fisik, jiwa maupun materi. Menurut KBBI (dalam Mulkam, 2002: 20) kekerasan diartikan sebagai tindakan fisik yang dilakukan seseorang maupun kelompok dengan tujuan untuk melukai secara fisik atau psikis dan juga untuk menghancurkan harta benda yang menjadi bagian dari orang tersebut.

Kekerasan politik merupakan salah satu bentuk kekerasan yang tidak dapat terlupakan dalam sejarah bangsa. Sejak zaman orde lama hingga kini kekerasan demi sebuah kekuasaan seakan menjadi rahasia umum. Menurut Gramsci (dalam Sukandi, 1999: 27) kekuasaan yang langgeng memerlukan dua perangkat kerja yang pertama berupa kekerasan yang bersifat memaksa dan yang kedua bersifat lunak atau membujuk. Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kekerasan menjadi cara yang jitu untuk mendapat kekuasaan.

Kekerasan politik bukan hanya melumpuhkan demokrasi akan tetapi juga merusak tatanan dan nilai moral. Sejalan dengan pendapat Sukandi (1999:32) yang mengemukakan bahwa kekerasan politik melemahkan unsur demokrasi dan kemanusiaan. Secara tidak langsung kekerasan politik menekan dan melecehkan hak-hak berbiicara, berpendapat, hak memilih, dan hak berorganisasi. Tidak berbeda dengan kekerasan lain kekerasan politik juga mengancam jiwa, fisik, dan harta benda orang yang bersangkutan.

Pada dasarnya kekerasan politik adalah tindakan dengan menggunakan kekuasaan secara berlebihan atau tidak wajar sehingga mengancam orang lain yang dilakukan untuk kepentingannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat The Liang Gie (dalam Facturohman dan Sobari 2002:15) bahwa ilmu politik adalah sekelompok ilmu teratur yang membahas gejala-gejala masyarakat dalam perjuangan manusia untuk mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan.

### **2.5.1 Bentuk-bentuk Kekerasan Politik**

Kekerasan merupakan tindakan yang melanggar nilai moral, karena mencelakai atau merugikan pihak lain. Akan tetapi di pihak lain pemerintah perlu melakukan kekerasan demi ketertiban dan mempertahankan nilai moral. Selain digunakan untuk mempertahankan atau mencapai kekuasaan, kekerasan politik juga dapat terjadi akibat kesenjangan sosial yang dialami oleh masyarakat. Hal tersebut menjelaskan bahwa kekerasan politik mempunyai dimensi yang luas.

Sementara itu Johan Galtung (dalam Thomas, 2001:93) menyebutkan bentuk atau dimensi kekerasan politik yaitu:

#### **a. Kekerasan fisik**

Kekerasan berbentuk fisik adalah kekerasan yang paling nyata dan tampak mata dapat terjadi antar individu, kelompok, antarnegara, kekerasan terhadap binatang dan juga lingkungan alam. Kekerasan yang melibatkan kontak secara langsung ini bertujuan untuk melukai, menciderai, atau penderitaan secara fisik. Tindakan yang termasuk dalam kekerasan fisik antara lain upaya untuk menyakiti jasmani orang lain seperti pemukulan, perkelahian, pengeroyokan, sampai pada

pembunuhan. Selain itu bentuk lain kekerasan fisik adalah pengrusakan barang pribadi maupun umum yang dapat menimbulkan kerugian secara materi contohnya adalah perusakan barang.

b. Kekerasan psikologis

Kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang halus bahkan jarang terlihat. Kekerasan psikologis adalah upaya mengancam, menekan dan membuat opini atau fitnah yang dapat melemahkan jiwa seseorang. Opini yang diciptakan tersebut disebarkan kepada masyarakat luas dengan tujuan mempengaruhi atau mendoktrin masyarakat bawasanya seseorang yang ingin dijatuhkan tersebut bukanlah pemimpin yang diharapkan. Salah satu contoh isu yang diciptakan adalah hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah yang dibangun mahasiswa demi menjatuhkan Presiden Suharto.

c. Pengaruh positif dan negatif

Pengaruh positif dan negatif diibaratkan sebuah imbalan atau hukuman, seseorang cenderung dapat melakukan kekerasan karena sebuah imbalan. imbalan yang dimaksud dalam hal ini adalah imbalan berupa uang, jabatan, kemudahan dan berbagai macam keuntungan lainnya. Dalam sistem ini terdapat pengendalian, tidak bebas, dan cenderung manipulatif. Johan Galtung menekankan bahwa pentingnya belajar memahami kekerasan, karena kekerasan sangat luas.

Novel *Tanjung Kemarau* merupakan novel yang di dalamnya mengungkapkan permasalahan politik lokal yang terjadi di Madura. Permasalahan sosial tersebut dibalut dengan berbagai macam konflik sosial lainnya yang semakin membuat novel ini menarik. Calon kepala desa menggunakan cara curang bahkan menggunakan kekerasan untuk mendapat jabatan yang diinginkan.

Kekerasan politik lokal yang dilakukan tokoh dalam novel juga sering terjadi dalam masyarakat seperti kekerasan fisik, kekerasan psikologi, dan pengaruh positif negatif.

